

Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia 2007-2021

Nenti Arianti Dewi*, Ria Haryatiningsih

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* nentiarianti0203@gmail.com, ria.haryatiningsih@gmail.com

Abstract. *Value added tax (PPN) and Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) is one type of indirect tax imposed on consumption at every level of production or distribution. Economic conditions greatly determine the size of tax revenue because the more passionate about economic activity, the more stimulating government revenue from taxes will be. This research uses secondary data in the form of time series data in the period of 2007-2021. The data analysis technique is used Ordinary Least Square (OLS) multiple linear regression analysis. The results showed that partially the GDP variable had no significant effect on PPN and PPnBM receipts, while the inflation variable and the percentage of the poor had a significant effect on PPN and PPnBM revenues. Then all the variables together giving a significant effect on the acceptance of PPN and PPnBM..*

Keywords: *Tax, Consumption, Fiscal Policy.*

Abstrak. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan salah satu jenis pajak yang bersifat tidak langsung yang dikenakan terhadap konsumsi pada setiap tingkatan produksi atau distribusi. Kondisi perekonomian sangat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak karena semakin bergairah aktifitas ekonomi maka akan semakin menstimulus pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data deret waktu (*time series*) dari tahun 2007-2021. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM, sedangkan variable inflasi dan persentase penduduk miskin berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Kemudian secara bersama-sama seluruh variable dapat memberi pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM.

Kata Kunci: *Pajak, Konsumsi, Kebijakan Fiskal.*

A. Pendahuluan

Kondisi perekonomian dapat dikatakan dalam kondisi yang baik saat pertumbuhan ekonominya cenderung stabil serta terus berupaya menuju keadaan yang lebih baik. Dalam rangka mengelola kondisi perekonomian, pemerintah merencanakan dan melaksanakan kebijakan fiskal melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara. Pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara. Kondisi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, dan tingkat suku bunga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Repository 2007).

Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan salah satu jenis pajak yang bersifat tidak langsung yang dikenakan terhadap konsumsi pada setiap tingkatan produksi atau distribusi. PPnBM merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi serta pengendalian pola konsumsi atas barang mewah. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dan bersifat objektif dan tidak kumulatif maka dari itu penerimaan PPN sangat bergantung pada kondisi perekonomian secara umum. Ketika perekonomian berlangsung stabil maka PPN akan berkembang ke arah yang positif.

Diantara sector pajak yang lainnya, PPN dan PPnBM memiliki persentase kontribusi tertinggi kedua dalam sumber pendapatan dalam negeri. PPN dan PPnBM menjadi sector pajak kedua terbesar yang memberikan pengaruh signifikan setelah PPh dengan kontribusi rata-rata sebesar 35%. Apabila dilihat dari segi potensi, PPN dan PPnBM memiliki kecenderungan peningkatan penerimaan pajak yang lebih signifikan dibandingkan pajak penghasilan. PPN dan PPnBM dapat dilimpahkan kepada setiap konsumen sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenai pajak pertambahan nilai. Meski tidak berhubungan secara langsung, tidak dipungkiri bahwa peningkatan konsumsi masyarakat tetap memberikan kontribusi dalam capaian penerimaan PPN dan PPnBM serta pendapatan dalam negeri pada umumnya. Daya beli masyarakat memiliki kontribusi tertinggi dalam struktur pertumbuhan ekonomi, yakni lebih dari 50% dari perekonomian Indonesia. Selain itu juga semua barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan barang kena pajak (BKP). Konsumsi dan ekspor menjadi pondasi dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga penerimaan negara yang berasal dari PPN dan PPnBM dapat dikatakan menjadi tulang punggung pajak negara.

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM belum berhasil mencapai target tersebut. Pada tahun 2007 hingga 2012 realisasi penerimaan PPN dan PPnBM terus meningkat. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 154 milyar rupiah dan pada tahun 2012 terjadi peningkatan hingga menyentuh angka 337 milyar rupiah. Namun setelah tahun 2013 realisasi penerimaan PPN dan PPnBM cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2014, 2015 serta 2019 menjadi tahun dimana realisasi penerimaan PPN dan PPnBM berada cukup jauh dari target APBN. Tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut terus mengalami penurunan mulai dari tahun 2013 sebesar 14%, tahun 2014 sebesar 6,4%, tahun 2015 sebesar 3,6% dan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar -2,7%. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, realisasi dan target penerimaan PPN berada pada selisih yang cukup jauh sebagai akibat dari perekonomian yang mengalami krisis akibat dilanda pandemi.

Selisih yang terjadi antara realisasi dengan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN merupakan salah satu catatan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi APBN. PPN dan PPnBM sebagai pajak yang dikenakan pada setiap tingkat produksi dan distribusi membuatnya sangat bergantung terhadap kegiatan konsumsi dan pendapatan masyarakat. Kemudian pendapatan masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, antara lain melalui indikator-indikator makro ekonomi yakni laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan persentase penduduk miskin.

Kondisi perekonomian sangat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak karena semakin bergairah aktifitas ekonomi maka akan semakin menstimulus pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Oleh karena kondisi makro yang dinamis dan terjadinya realisasi yang

tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi guna mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya yang menyebabkan penerimaan PPN dan PPnBM tidak tercapai dengan maksimal. Maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kondisi Perekonomian Terhadap Penerimaan PPN Dan PPnBM Indonesia 2007 – 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan iklan kondisi perekonomian dengan penerimaan PPN dan PPnBM?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh PDB terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN dan PPnBM Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh persentase penduduk miskin terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia

B. Metodologi Penelitian

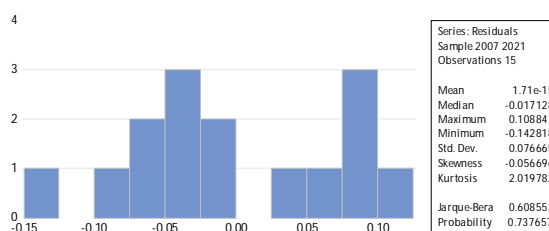
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti. Bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya penerimaan PPN dan PPnBM yang diperoleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*time series*) dari tahun 2007-2021. Selain itu penulis juga memperoleh data melalui internet, jurnal – jurnal ilmiah dan kepustakaan yang relevan dengan tujuan dari penelitian ini. Untuk mengolah data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah variable independen dapat mempengaruhi variable dependen. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas), serta uji statistic yang terdiri dari pengujian parsial (uji statistik t), koefisien determinasi, dan pengujian simultan (uji statistik F). Analisis data dari model penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan OLS klasik yang dibantu dengan perangkat lunak Program Eviews 12.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Statistik dan Ekonometrika

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Wilayah kritis penolakan H_0 adalah probabilitas (p-value) $< \alpha$, sedangkan daerah penerimanya adalah probabilitas (p-value) $> \alpha$. Hasil uji normalitas residual di atas adalah nilai *Jarque-Bera* sebesar 0.608553 dengan p value sebesar 0.737657 dimana nilai tersebut berada $> 0,1$ atau lebih dari signifikansi 10% sehingga menolak H_1 atau yang berarti residual berdistribusi normal.

Uji Statistik

Uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pengujian data statistic parametrik. Statistik parametrik merupakan teknik pengujian data dalam statistic yang berguna untuk menguji

hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda *Ordinary Least Square* (OLS) untuk membuktikan apakah ke tiga variable yaitu laju pertumbuhan PDB (X1), inflasi (X2), dan persentase penduduk miskin (X3) berpengaruh atau tidak terhadap variable dependen yaitu penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia (Y). Analisis regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang dapat digunakan untuk mengetahui, menguji serta memprediksi hubungan antar variable terikat. Analisis data dari model penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan OLS klasik yang dibantu dengan perangkat lunak Program Eviews 12. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Dependent Variable: LY
Method: Least Squares
Date: 07/18/22 Time: 17:07
Sample: 2007 2021
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.96770	0.133615	112.0208	0.0000
X1	-0.004886	0.012961	-0.376963	0.7134
X2	0.017870	0.010741	1.663709	0.1244
X3	-0.192836	0.013045	-14.78239	0.0000

R-squared	0.964767	Mean dependent var	12.75646
Adjusted R-squared	0.955157	S.D. dependent var	0.408434
S.E. of regression	0.086490	Akaike info criterion	-1.834393
Sum squared resid	0.082286	Schwarz criterion	-1.645580
Log likelihood	17.75795	Hannan-Quinn criter.	-1.836404
F-statistic	100.4012	Durbin-Watson stat	1.338276
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar 2. Hasil Regresi

Dari gambar diatas kita dapat mengetahui nilai koefisien X1 sebesar -0.004886 dengan probabilitas 0.7134. Sedangkan nilai koefisien X2 sebesar 0.017870 dengan probabilitas 0.1244. Dan nilai koefisien X3 sebesar -192836 dengan probabilitas 0.0000. R-squared yang didapat sebesar 0.964767 atau 96% dengan *standar error of regression* sebesar 0.086490. Dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 10\%$, maka nilai probabilitas dari variable bebas X1 memiliki nilai lebih dari 0,1 dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM. Dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 12\%$, variable X2 memiliki nilai tidak lebih dari 0,12 maka dapat dikatakan inflasi dapat mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM. Sedangkan nilai probabilitas dari variable bebas X3 memiliki nilai kurang dari tingkat signifikansi atau taraf nyata yakni 0,1 maka dapat dikatakan persentase penduduk miskin mempengaruhi meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dideteksi dengan melihat koefisien korelasi antar variable bebas pada *correlation matrix*. Apabila dalam *matrix* tersebut menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas yakni tidak melebihi 0,8 maka dapat dinyatakan terbebas dari multikolinieritas. Hasil pengujian *correlation matrix* dapat dilihat pada Tabel 1 dimana dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel-variabel tidak ada yang lebih dari 0,8. Adapun nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 0.017853, artinya bahwa tidak terdapat multikolinier di dalam model. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa variable tersebut memenuhi syarat dari model regresi yang baik dan terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

	C	X1	X2	X3
C	0.017853	-0.000278	0.000478	-0.001551
X1	-0.000278	0.000168	-4.69E-05	-2.68E-05
X2	0.000478	-4.69E-05	0.000115	-6.79E-05
X3	-0.001551	-2.68E-05	-6.79E-05	0.000170

Heteroskedastis

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat nilai p value, apabila nilainya berada pada $< 0,1$ maka terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai p value berada pada $> 0,1$ maka bebas masalah heteroskedastisitas. Pada kasus data tersebut diketahui bahwa nilai probabilitas chi-square pada $\text{Obs}^* \text{R-Squared}$ sebesar 0,3175 yakni berada pada $> 0,1$ maka terima H_0 yang berarti model regresi bersifat homoskedastis atau dapat dikatakan model ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.264392	Prob. F(9,5)	0.4181
Obs*R-squared	10.42111	Prob. Chi-Square(9)	0.3175
Scaled explained SS	2.857553	Prob. Chi-Square(9)	0.9697

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**Autokorelasi**

Autokorelasi dapat diartikan bahwa terdapat korelasi antar waktu. Sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear berganda dengan data time series atau runtun waktu. Setelah dilakukan uji autokorelasi pengambilan kesimpulan autokorelasi dapat dilihat dari nilai Prob Chi Square(1) yang merupakan nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*, yaitu sebesar 0.3764 dimana nilai tersebut $> 0,1$ sehingga terima H_0 atau yang berarti tidak ada masalah autokorelasi serial.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag			
F-statistic	0.550306	Prob. F(1,10)	0.4753
Obs*R-squared	0.782403	Prob. Chi-Square(1)	0.3764

Gambar 4. Hasil Uji Autokorelasi**Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji bagaimanakan pengaruh seluruh variable independent atau variable bebas terhadap variable dependennya atau tidak bebas. Adapun hasil pengujian untuk uji F dapat dilihat pada Gambar 2. Diketahui bahwa nilai probabilitas (F statistik) sebesar 0,000000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 10\%$ atau $< 0,1$. Artinya bahwa pada model tersebut minimal ada satu variable independen yang mempengaruhi variable dependen. Selain itu dapat pula dikatakan bahwa hipotesisnya adalah menolak H_0 ($H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3$) dan H_a diterima atau semua variable independent secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.

Uji T

Uji T atau yang disebut sebagai uji signifikansi secara parsial karena melihat signifikansi masing-masing variable yang terdapat di dalam model. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variable maka digunakan taraf nyata atau tingkat signifikansi sebesar $10\% = 0,1$ dan $12\% = 0,12$. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari $0,1$ dan $0,12$ berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variable independen terhadap variable dependen. Kemudian apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $0,1$ maka hal tersebut berarti terdapat pengaruh pada variable dependen. Adapun hasil pengujian pada Uji T dapat dilihat pada Gambar 2.

Diketahui nilai probabilitas dari variable X1 adalah 0.7134 dimana nilai tersebut berada $> 0,1$ sehingga menolak H1. Hal ini berarti X1 tidak memiliki pengaruh secara nyata atau signifikan terhadap variable dependen (Y). Variable X2 memiliki nilai probabilitas 0.1244 . Dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 12\%$, dimana nilai tersebut berada tidak lebih dari $0,12$ sehingga menerima H1. Hal ini berarti X2 berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap variable dependen (Y). Kemudian variable X3 memiliki nilai 0.0000 dimana nilai tersebut berada $< 0,1$ sehingga menerima H1. Hal ini berarti X3 berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap variable dependen (Y). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variable X2 dan X3 berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (Y) sedangkan variable X1 tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variable Y.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien regresi atau *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan model dalam menjelaskan variasi variable terikat. Dalam Gambar 1.2 dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0.964767 , nilai R-squared tersebut sama dengan 96% . Angka tersebut mengandung arti bahwa variable X1, X2, X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap variable Y sebesar 96% . Sedangkan sisanya yaitu sebesar 4% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak masuk ke dalam model persamaan atau variable yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Laju Pertumbuhan PDB Terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada hasil pengujian variable X1 yakni PDB terhadap penerimaan PPN dan PPnBM diketahui bahwa laju pertumbuhan PDB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Berdasarkan analisis regresi pada gambar 1.2 diperoleh nilai koefisien X1 sebesar -0.004886 dengan probabilitas 0.7134 . Dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 10\%$, maka nilai probabilitas dari variable bebas X1 yang memiliki nilai lebih dari tingkat signifikansi yakni $0,1$ dapat dikatakan laju pertumbuhan PDB tidak mempengaruhi realisasi penerimaan PPN dan PPnBM.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif stabil di tengah gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara rata-rata sebesar $5,6$ persen. Meskipun pada tahun 2008 dan tahun 2020 perekonomian Indonesia sempat mengalami krisis akibat adanya krisis finansial global. Kondisi krisis tersebut memberi dampak yang hanya sesaat di Indonesia, sebab kondisi tersebut dapat tertolong oleh aktivitas ekonomi masyarakat serta perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Konsumsi masih tumbuh stabil dan tidak terjadi kontraksi yang cukup berarti di tengah krisis finansial global yang melanda. Konsumsi masih menjadi pondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat dapat tumbuh sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat akan tetap sama atau bahkan menurun akibat gejolak perekonomian yang terjadi.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada hasil pengujian variable X2 yakni Inflasi terhadap penerimaan PPN dan PPnBM diketahui bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Berdasarkan analisis regresi pada gambar 1.2 diperoleh nilai koefisien X2 sebesar 0.017870 dengan probabilitas 0.1244 . Artinya bila tingkat

inflasi meningkat 1%, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM akan bertambah sebesar 0.017870 milyar. Dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 12\%$, maka nilai probabilitas dari variable bebas X2 yang memiliki nilai signifikansi sama dengan 0,12 dapat dikatakan inflasi secara parsial mempengaruhi realisasi penerimaan PPN dan PPnBM.

Inflasi memberi dampak yang merugikan terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang hidup sedikit diatas garis kemiskinan. Meskipun peningkatan inflasi yang terjadi relatif kecil, tetap akan membuat masyarakat semakin tertekan. Kelompok masyarakat menengah bawah mencapai 115 juta orang atau sebesar 45% dari total populasi. Kelompok masyarakat menengah bawah menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk keperluan makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari yang termasuk ke dalam objek PPN. Oleh sebab itu, terjadinya peningkatan harga akan berdampak pada daya beli serta kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, Azhari Sofyan, Zirman (2021) menjelaskan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada hasil pengujian variable X3 yakni persentase penduduk miskin terhadap penerimaan PPN dan PPnBM diketahui bahwa persentase penduduk miskin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM. Berdasarkan analisis regresi pada gambar 1.2 diperoleh nilai koefisien X3 sebesar -0.192836 dengan probabilitas 0.0000. Artinya bila persentase penduduk miskin meningkat 1%, maka realisasi penerimaan pppn dan ppnbm akan turun sebesar 0.192836 milyar. Dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 10\%$, maka nilai probabilitas dari variable bebas X2 yang memiliki nilai kurang dari 0,1 dapat dikatakan persentase kemiskinan mempengaruhi realisasi penerimaan PPN dan PPnBM.

Beban PPN antara kelas pendapatan terendah dengan kelas pendapatan tertinggi tidak berbeda jauh. Jumlah masyarakat kelas menengah merupakan kontributor terbesar terhadap konsumsi agregat yang juga merupakan basis pajak terbesar untuk pajak konsumsi seperti PPN yakni sebesar 43%. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang terus meningkat dibandingkan masyarakat kelas bawah akan berpengaruh positif pada peningkatan sumber penerimaan negara di masa yang akan datang khususnya yang bersumber dari pajak konsumsi seperti PPN. Apabila persentase penduduk miskin tidak dapat dikendalikan maka penerimaan PPN dan PPnBM akan menurun. Sebaliknya, apabila persentase penduduk miskin dapat terus ditekan dan kelompok masyarakat kelas menengah terus berkembang maka akan berpengaruh pada peningkatan potensi penerimaan PPN dan PPnBM.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh Alwi, dkk (2021) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya ketika tingkat kemiskinan meningkat maka penerimaan pajak akan menurun, dan begitu pula sebaliknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM
2. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM
3. Persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM
4. Laju pertumbuhan PDB, inflasi dan persentase penduduk miskin secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN dan PPnBM

Acknowledge

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak luput dari kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang ada. Akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, penyusunan penelitian ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ria Haryatiningsih, SE., MT selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran ditengah kesibukannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.
2. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
3. Keluarga yang selalu memberi doa serta dukungan moril dan materil yang tidak pernah terputus.
4. Teman – teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Alwi, Muh., Muhammad Su'un, and Amiruddin. 2021. "Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Serta Opini Audit Variabel Intervening Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4(April):54–65.
- [2] Bala, Gladys Mita Marthina, David P. E. Saerang, and Inggriani Elim. 2018. "Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1):404–11. doi: 10.32400/gc.13.04.21173.2018.
- [3] Handoko, I., H. Aimon, and E. Syofyan. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perekonomian Dan Penerimaan Pajak Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 3(05):103671.
- [4] Indahsari, Devi Nur, and Primandita Fitriandi. 2021. "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 3(1):24–36. doi: 10.31092/jpkn.v3i1.1202.
- [5] Manihuruk, Wiston. 2012. "Pajak Pertambahan Nilai Indonesia." *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* 35.
- [6] Marlyanti, Nindita Dwi, and Aristha Purwanthari Sawitri. 2020. "Pengaruh Kebijakan Perpajakan Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak." *Jurnal Akuntansi* 4(2):118–25.
- [7] Masyitah, Emi. 2016. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan PPN Dan PPNBM." *Accumulated Journal* 1983(8):89–103.
- [8] Pajak, Penerimaan. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak." *Accounting Analysis Journal* 3(1). doi: 10.15294/aaaj.v3i1.3907.
- [9] Pembangunan, Jurnal Ekonomi. 2009. "Peranan Pajak Untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran." 10(2).
- [10] Sadono Sukirno. (2006). *Ekonomi pembangunan : proses, masalah, dan dasar kebijakan / Sadono Sukirno*. Jakarta :: Kencana,.
- [11] Sapridawati, Y., N. Indrawati, and ... 2021. "Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai." *The Journal of ...* 2(1):75–93.
- [12] Simarmata, Moraulina Marsella. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Indonesia." *Quantitative Economics Journal* 7(1):22–33. doi: 10.24114/qej.v7i1.17549.
- [13] Utari, Woro. 2008. "Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai." *Jurnal* 1–16.
- [14] Tami, Rahdya Iasyah Nindea. (2021). Faktor Internal dan Eksternal yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 24-33.